



## **KENDALA KERJASAMA MERIDA INITIATIVE DALAM PENANGANAN PENYELUNDUPAN *SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS* (PERIODE 2008-2012)**

**Zaqla Indah Virgiyanti**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

Transnational crime is an important issue because the threat impacts take place across the borders of two or more countries. Armed violence by the Mexican Drugs Trafficking Organization is increasingly threatening the security of Mexico, due to the access of weapons smuggled from United States. The Merida Initiative was signed in 2008 with the aim of addressing the threat of transnational organized crime. But in 2007-2012, the number of smuggling of weapons continues to increase. This research then aims to analyze the constraints on Merida Initiative implementation in combating the smuggling of small arms and light weapons. This research uses the neoliberalism paradigm in understanding the inhibiting factors of the success of a cooperation, thus explaining the cause of the increased number of smuggling weapons after Merida Initiative was signed. The results showed that the inhibiting factor in combating the smuggling of small arms and light weapons is the absence of mutuality of interest. The absence of mutuality of interest is explained by the responses that are given not in accordance of what was expected from other country. The absence of mutuality of interest results in a tendency for a state to prioritize the national interest above the common interest.

**Keywords:** *Neoliberalism; the smuggling of small arms and light weapons; mutuality of interest; United States; Mexico.*

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan mengenai *Small Arms and Light Weapons* tidak dapat dipisahkan dengan kelompok-kelompok *Transnational Organized Crime*. Ketika dimensi batas wilayah dilibatkan, kekerasan bersenjata non-konflik dapat diidentifikasi sebagai ancaman transnasional. Penggunaan senjata tersebut mempengaruhi keamanan hampir seluruh lapisan penduduk di suatu negara. Kasus-kasus penembakan yang terjadi di sekolah-sekolah di Amerika Serikat,

kekerasan bersenjata antar kartel di Amerika Selatan, hingga kasus-kasus seperti perampokan bersenjata. Terlebih jika kekerasan bersenjata dapat mempengaruhi keamanan nasional suatu negara.

Berdasarkan hasil laporan Small Arms Survey (2007), penduduk sipil terkena dampak paling buruk dalam penggunaan Small Arms and Light Weapons karena persebaran yang tidak terkontrol beredar dalam masyarakat. Dari total senjata yang beredar, sebanyak 75 persen atau sebanyak 650 juta senjata dimiliki oleh penduduk sipil. Penduduk sipil Amerika Serikat memiliki sebanyak 270 juta dari total senjata yang dimiliki penduduk sipil dunia. Rata-rata kematian yang diakibatkan oleh Small Arms and Light Weapons sebanyak 10-20 persen yang terjadi lingkungan yang mengalami kekerasan bersenjata non-konflik. Setiap tahun, kekerasan bersenjata menewaskan lebih dari 526.000 orang (Small Arms Survey, 2007).

Amerika Serikat merupakan negara produsen dan pengeksport senjata terbesar di dunia setidaknya dalam kurun waktu satu dekade, 2001-2011. Amerika Serikat juga merupakan eksportir senjata kategori *Small Arms and Light Weapons* terbesar di dunia. Sebagai negara produsen senjata terbesar, Amerika Serikat mengalami kerugian yang besar akibat kepemilikan senjata oleh penduduknya. Pada tahun 2007 saja, terjadi dua belas kasus penembakan massal di Amerika Serikat (washingtonpost.com).

Banyaknya kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Amerika Serikat, pada kenyataannya juga memberikan dampak kepada negara tetangganya yaitu Meksiko. Dalam laporan Alcohol Tobacco and Firearms, disebutkan sebanyak 70 persen senjata yang beredar di Meksiko berasal dari Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan Meksiko hanya memiliki satu *gun store* yang dikelola oleh militer Meksiko sehingga tidak mungkin penduduk sipil dapat memperoleh senjata di dalam negeri (ATF Report, 2012).

Terlebih lagi, Meksiko merupakan rumah dari kelompok-kelompok kejahatan transnasional, dalam hal ini kartel narkoba atau yang sering disebut *Drugs Trafficking Organization*. Dengan posisi geografis antara Amerika Serikat dan Meksiko yang hanya dibatasi oleh perbatasan sepanjang 2000 mil, kegiatan penyelundupan senjata tidak dapat dipisahkan dari DTO Meksiko. DTO Meksiko menggunakan senjata demi tujuan organisasinya, yaitu untuk melindungi pengiriman dan penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat, mengontrol rute suplai narkoba, sekaligus mengintimidasi dan melemahkan DTO rival serta melindungi diri mereka dari penegak hukum Meksiko.

Kekerasan bersenjata yang terjadi di Meksiko mengalami peningkatan khususnya setelah Presiden Meksiko Felipe Calderon menerapkan kebijakan "*war against drug trafficking*" tahun 2011. Kebijakan "*War against drug trafficking*" yang diterapkan oleh Presiden Calderon memicu DTO Meksiko untuk melakukan perlawanan. Menurut laporan Transborder Institute, sejak kebijakan tersebut diberlakukan, kekerasan bersenjata terkait narkoba meningkat tajam dari hanya 2000 orang pada tahun 2007, terus meningkat hingga menjadi 18000 orang di tahun 2011 (Trans-Border Institute, 2011).

Pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko kemudian melakukan suatu kerja sama untuk menangani permasalahan tersebut. Kerja sama Merida Initiative

kemudian ditandatangani tahun 2008. Kerja sama tersebut bertujuan untuk menekan eksistensi DTO Meksiko dalam melakukan bisnisnya, termasuk bisnis narkoba dan penyelundupan *small arms and light weapons*.

Untuk mewujudkan komitmen kerja sama Merida Initiative, Amerika Serikat memberikan dana sebanyak \$1,5 milyar kepada Meksiko pada periode pertama Merida Initiative tahun 2008-2010. Presiden Obama kemudian memperpanjang bantuan dana tersebut untuk kepolisian dan militer sebanyak \$178.2 juta pada tahun 2011 dan \$329.6 juta untuk tahun 2012. Selain dana, pelatihan juga diberikan kepada penegak hukum Meksiko (US Department of State)

Sebagian besar dana yang dikucurkan untuk Merida Initiative digunakan untuk pembelian peralatan teknologi seperti helikopter, pesawat pengintai untuk militer Meksiko, termasuk logistik, *spare part*, hingga paket pelatihan. Peralatan inspeksi seperti *scanners* dan *x-rays vans*, hingga anjing pelacak yang diberikan kepada Meksiko di pintu masuk perbatasan. Kendaraan lapis baja serta rompi anti peluru diberikan kepada petugas keamanan Meksiko. Sebagian dana diberikan untuk bantuan teknis dalam melacak peredaran senjata. Tidak hanya peralatan, pemerintah Amerika Serikat juga mengerahkan departemen-departemen negaranya untuk membantu Meksiko di berbagai bidang seperti lembaga peradilan.

Dalam upaya menekan aliran senjata, Amerika Serikat dan Meksiko bergantung pada sistem pelacakan senjata yang disebut eTrace. eTrace merupakan *software* pelacak senjata yang dikembangkan oleh ATF. Pada tahun 2010, ATF meluncurkan Spanish eTrace, yaitu alat pelacak senjata berbasis bahasa Spanyol. Merida Initiative memberikan dana sebesar \$4.5 juta untuk pembangunan Spanish eTrace tersebut. ATF bekerja sama dengan Meksiko untuk meningkatkan penggunaan dari sistem pelacak tersebut, serta memasang sistem pelacak tersebut ke sembilan konsulat Amerika Serikat di Meksiko (US Department of Justice). Selain itu, \$20 juta diberikan untuk empat Integrated Ballistics Identification System untuk mencocokkan bukti balistik (Kerlikowske, 2009:33-34).

Sistem pelacakan dibutuhkan karena metode penyelundupan yang dilakukan oleh DTO Meksiko menggunakan metode *straw purchase*. *Straw purchase* adalah suatu metode dimana DTO Meksiko membeli senjata dari *straw purchaser* atau orang-orang yang memiliki hak untuk memperoleh senjata tersebut di Amerika Serikat. Misalnya, penduduk berkewarganegaraan Amerika Serikat yang tidak memiliki catatan kriminal. Senjata tersebut kemudian diberikan kepada *broker*—orang yang berafiliasi dengan anggota DTO Meksiko, membawanya melintasi perbatasan Southwest hingga sampai ke tangan DTO Meksiko. eTrace diperlukan untuk investigasi keberadaan senjata serta mendeteksi berasal dari mana senjata tersebut.

Setelah kerja sama Merida Initiative berjalan, ditemukan bahwa angka penyelundupan *Small Arms and Light Weapons* terus menanjak naik. Sejak ditandatangani tahun 2008, terdapat lonjakan aktifitas penyelundupan senjata yang meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelum kerja sama Merida Initiative dibentuk. Pada tahun 2008, terdapat sebanyak 500.000 keping senjata yang meningkat hingga 3.500.000 keping senjata di tahun 2011. Dapat kita katakan bahwa tahun 2011 merupakan tahun dimana penyelundupan *small arms*

*and light weapons* mencapai angka tertinggi setelah lonjakan di tahun 2008 (Weigend and Guevara, nd).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul adalah mengapa angka penyelundupan *small arms and light weapons* terus meningkat setelah terbentuknya kerja sama Merida Initiative oleh Amerika Serikat dan Meksiko? Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam menanggulangi permasalahan penyelundupan *small arms and light weapons*. Kedua, untuk mengetahui kendala Merida Initiative yang mengakibatkan peningkatan angka penyelundupan *small arms and light weapons*. Penelitian ini menggunakan paradigma neoliberalisme dalam melihat kendala apa saja yang ada pada kerja sama Merida Initiative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis kelemahan yang ada pada implementasi Merida Initiative, menggunakan teori kerja sama Internasional oleh Robert Keohane. Data – data dari penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yaitu data berasal dari buku – buku, jurnal, publikasi, maupun berita – berita terkait.

## **PEMBAHASAN**

Dalam suatu kerja sama, mutualitas kepentingan sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kerja sama. Dalam *Letter of Agreement* Merida Initiative, tujuan Amerika Serikat dan Meksiko adalah untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisir yang dilakukan oleh DTO Meksiko. Meskipun memiliki tujuan yang sama, namun kerja sama ini juga terbentuk dari persepsi masing-masing negara mengenai kepentingannya. Kepentingan kedua negara diselaraskan berdasarkan dampak yang dirasakan pada masing-masing negara. Dampak yang berbeda-beda menyebabkan tidak adanya mutualitas kepentingan bagi kedua negara. Hal tersebut menghasilkan respon yang berbeda oleh kedua negara dalam menanggulangi penyelundupan *Small Arms and Light Weapons*.

Berdasarkan perspektif Meksiko, DTO Meksiko mengancam kondisi keamanan domestiknya. Kebijakan *war against drug trafficking* yang dibentuk oleh Presiden Calderon menimbulkan perlawanan dari DTO Meksiko. ribuan korban tewas karena kekerasan bersenjata, perang antar DTO Meksiko, hingga perang antara DTO dengan penegak hukum Meksiko. Korban yang berjatuh pun merupakan warga sipil, hingga petugas keamanan bahkan pejabat tinggi Meksiko. Tidak terkecuali politisi, jurnalis hingga pebisnis yang diintimidasi oleh kelompok DTO Meksiko tersebut. Kebijakan “*War Against Drug Trafficking*” kemudian menjadi agenda keamanan utama pemerintah Meksiko. Terhitung dalam kurun waktu satu dekade, sejak Januari 2001-Mei 2009, sebanyak 476 tentara tewas termasuk 105 diantaranya adalah polisi. Selain korban tewas, sebanyak 173 lainnya terluka sejak tahun 2006-2009 (Camp, 2010). Hal tersebut dikarenakan konfrontasi bersenjata antara pihak berwenang dengan anggota DTO Meksiko. Senjata yang berasal dari Amerika Serikat memberikan pengaruh yang signifikan atas konflik bersenjata yang terjadi di Meksiko

Lain halnya dengan Amerika Serikat, eksistensi DTO Meksiko menimbulkan ancaman kesehatan atas pemakaian narkoba oleh penduduknya.

Penduduknya menempati peringkat pertama dunia sebagai konsumen narkoba jenis kokain. Karena berbatasan langsung dengan Meksiko, DTO Meksiko menjadi produsen dan penyuplai narkoba jenis heroin, *methamphetamine*, dan marijuana terbesar. Meksiko juga merupakan negara transit bagi distribusi kokain ke Amerika Serikat. Pengaruh distribusi narkoba DTO Meksiko mencapai hingga ke 230 kota di Amerika Serikat (GAO Report, 2009).

DTO Meksiko menggunakan pangsa pasar Amerika Serikat untuk suplai narkoba, serta menggunakan senjata yang diperoleh dari Amerika Serikat untuk mengamankan bisnisnya dari pemerintah Meksiko. Pangsa pasar narkoba yang besar serta 70 persen senjata berasal dari Amerika Serikat menyebabkan Amerika Serikat secara tidak langsung turut menyuburkan aktifitas DTO Meksiko (ATF Reports, 2012)

Dari penjelasan mengenai dampak di atas, terlihat bahwa DTO Meksiko membawa ancaman yang berbeda bagi Amerika Serikat dan Meksiko. Meksiko terancam keamanan domestiknya selain karena narkoba, juga karena permasalahan keamanan yaitu kekerasan bersenjata yang dilakukan DTO Meksiko. Sedangkan bagi Amerika Serikat, kondisi dalam negeri terancam karena penggunaan narkoba yang meningkat di dalam negeri yang dipasok oleh DTO Meksiko.

Kepentingan merupakan kebutuhan yang disadari, kepentingan kedua negara menyelaraskan kebutuhannya untuk bertindak berdasarkan ancaman yang dibawa oleh DTO Meksiko. Dari dampak yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa narkoba mengancam kedua belah pihak sama besarnya. Bagi Meksiko, dampak kekerasan bersenjata sangat mengancam keamanan negaranya. Sedangkan bagi Amerika Serikat, eksistensi DTO tidak banyak mengancam keamanan, tapi lebih mengancam kesehatan penduduknya. Sehingga kepentingan untuk menekan aliran senjata tidak menjadi prioritas bagi Amerika Serikat.

Dari penjelasan di atas, kedua negara tidak memiliki mutualitas kepentingan untuk menekan aliran senjata. Tidak adanya mutualitas kepentingan menyebabkan negara melakukan respons yang berbeda. Besarnya respons yang dilakukan suatu negara berbanding lurus dengan besarnya dampak yang dialami. Negara memiliki kepentingan untuk menanggulangi dampak yang dirasakan. Amerika Serikat yang dampak besarnya terkait narkoba, memberikan respons yang besar terkait penanganan narkoba, namun tidak dengan masalah kekerasan bersenjata oleh DTO. Sehingga meskipun Amerika Serikat berjanji untuk menekan aliran senjata sebagai bagian dari tujuan dibentuknya Merida Initiative, tetapi dalam prakteknya kepentingan untuk menekan aliran senjata bukanlah kepentingan utamanya. Sedangkan Meksiko yang dampaknya meliputi pemakaian narkoba dan yang paling utama adalah kekerasan bersenjata yang tinggi, memiliki kepentingan untuk memberikan respons yang serius terkait penanganan narkoba serta pelucutan senjata.

Tidak adanya mutualitas kepentingan untuk menanggulangi penyelundupan senjata semakin jelas terlihat dari perbedaan respon yang diberikan kedua negara. Pemerintah Meksiko memberikan respon dengan cara mengerahkan strategi konfrontasi langsung dengan DTO Meksiko. Pasukan bersenjata dikerahkan untuk menangkap anggota-anggota DTO, serta melucuti

senjatanya. Pemerintah Meksiko berhasil meningkatkan penyitaan senjata sejak pertama kali Presiden Calderon menjabat tahun 2006. Sejak Merida Initiative berjalan, di tahun 2009 pemerintah Meksiko menyita senjata sebanyak 32.332 senjata, lebih banyak 22.770 senjata dibandingkan tahun 2007. Dari bulan Desember 2006 hingga Agustus 2010, total senjata telah disita sebanyak lebih dari 85.000. Dan estimasi sebanyak 5 juta butir amunisi yang disita sejak Desember 2006 hingga Mei 2010 (Goodman & Marizco, 2010: 10).

Senjata disita dari razia pada rumah-rumah atau tempat yang berhubungan dengan DTO Meksiko dan melalui inspeksi kendaraan di dalam wilayah Meksiko. Petugas Pabean memonitor jalur perdagangan melalui pelabuhan masuk, hingga 21 kilometer ke arah selatan perbatasan Meksiko. Pemerintah Meksiko juga menyita senjata setelah baku tembak dengan DTO Meksiko. Meksiko juga memberikan informasi kepada pemerintah Amerika Serikat terkait investigasi serta penuntutan. Kedutaan Amerika Serikat di Meksiko memberi laporan bahwa Meksiko juga membagi data dan informasi atas investigasi awal, investigasi terhadap *straw purchase*, penuntutan serta segala tindakan hukum dengan Amerika Serikat (Goodman & Marizco, 2010: 11).

Amerika Serikat membantu Meksiko dengan memberikan berbagai peralatan untuk mendukung penegak hukum di Meksiko dalam melakukan operasi-operasi dalam kebijakan *War against drug trafficking*. Selain membantu memberikan peralatan kepada Meksiko, Amerika Serikat bertugas untuk menjaga perbatasan dan memastikan bahwa DTO Meksiko tidak dapat memperoleh senjata dari Amerika Serikat. ATF diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai upaya untuk memantau kemungkinan adanya aksi penyelundupan senjata di perbatasan dengan Meksiko. Upaya yang paling ditekankan oleh ATF yaitu menghentikan kegiatan *Straw Purchase* dalam operasi Project Gunrunner serta melacak peredaran senjata menggunakan eTrace (US Department of Justice, 2012).

Kucuran dana serta bantuan pelatihan memperlihatkan bahwa Amerika Serikat serius dengan tujuannya untuk memberantas eksistensi DTO Meksiko. Namun dalam upaya untuk menanggulangi penyelundupan senjata, Meksiko memiliki alasan yang kuat namun tidak dengan Amerika Serikat. Hal tersebut ditunjukkan dari respon yang diberikan Amerika Serikat dalam menanggulangi penyelundupan senjata berikut ini.

Pada tahun 2011, terdapat skandal taktik *walking guns* yang terbuka di media. Seorang *whistle blower* yakni petugas ATF John Dodson melakukan pernyataan terbuka kepada media bahwa ATF secara sengaja meloloskan senjata ke tangan DTO Meksiko. Dodson mengklaim bahwa Dave Voth, seorang supervisor ATF, memerintahkannya untuk tidak menangkap *straw purchaser* karena ATF berusaha melacak pemimpin dari kelompok kriminal tersebut ([www.cbsnews.com](http://www.cbsnews.com)).

Skandal tersebut terkuak setelah kematian seorang petugas Border Patrol Amerika Serikat, agen Brian Terry pada 14 Desember 2010. Dalam autopsinya ditemukan sebuah peluru yang berasal dari Amerika Serikat. Di tempat kejadian perkara, dua senjata yang ditemukan menunjukkan bahwa senjata tersebut dibeli

oleh DTO Meksiko yaitu kartel Sinaloa. Kedua senjata tersebut berhasil terlacak berasal dari operasi Fast and Furious (US Department of Justice, 2012).

Operasi Fast and Furious merupakan bagian dari Project Gunrunner. Berdasarkan dokumen dan testimoni di hadapan Kongres Amerika Serikat, petugas ATF Divisi lapangan Phoenix meloloskan senjata ilegal yang ditujukan untuk DTO Meksiko. Laporan kemudian menunjukkan bahwa senjata tersebut merupakan senjata yang dibeli oleh Jaime Avila, seorang *straw purchaser* yang diincar dalam operasi Fast and Furious. Kejadian tersebut kemudian membuka penyelidikan terhadap skandal yang dilakukan oleh ATF.

Kepala bagian Department of Justice Lanny Breuer merupakan pejabat tertinggi yang mengaku mengetahui jika ATF menggunakan taktik *walking guns* tersebut. Breuer mengatakan bahwa “ATF meloloskan sejumlah senjata, dan hal tersebut merupakan hal yang memalukan bagi ATF” ([www.cbsnews.com](http://www.cbsnews.com)). Terlebih lagi, pemerintah Meksiko tidak diberi informasi mengenai taktik *walking guns* tersebut yang mengakibatkan kurangnya koordinasi kedua negara.

Dalam taktik *walking guns* yang dilakukan oleh ATF, terdapat sebanyak 1.961 senjata yang diloloskan dalam operasi Fast and Furious. Hanya 710 senjata yang berhasil dilacak kembali oleh ATF, sisanya sebanyak 1.251 senjata hilang tanpa jejak. Dari senjata tersebut saja, 150 kematian penduduk Meksiko disebabkan oleh senjata yang diloloskan dalam operasi Fast and Furious (US Department of Justice, 2012).

Dalam skandal operasi Fast and Furious ini lah komitmen Amerika Serikat untuk menghentikan aliran senjata dipertanyakan. Sebagai lembaga utama yang berwenang dalam menangani penyelundupan senjata ke Meksiko, Amerika Serikat melalui ATF berkomitmen untuk menghentikan aliran senjata. Namun dalam skandal Fast and Furious tersebut, terlihat bahwa kepentingannya bukanlah menekan aliran senjata, melainkan menangkap pemimpin dari DTO Meksiko. Hal tersebut jelas bertolak belakang dengan komitmen Amerika Serikat untuk menekan aliran senjata melalui perbatasan barat daya.

Sikap Amerika Serikat menunjukkan bahwa, pada akhirnya ketika dihadapkan dengan preferensi dari kepentingannya, Amerika Serikat lebih memprioritaskan penanganan terkait narkoba. Respon Amerika Serikat tersebut menunjukkan bahwa aktor dalam sebuah kerja sama akan bertindak sesuai dengan kepentingan yang mereka miliki. Jika kekerasan bersenjata karena DTO tidak banyak berdampak bagi keamanan Amerika Serikat, maka menyetop aliran senjata tidak akan diprioritaskan di atas kepentingan penanganan narkoba.

Terlebih lagi, dengan tidak diberitahukannya pemerintah Meksiko atas taktik *walking guns* tersebut menyebabkan senjata tersebut hilang dan tidak dapat dilacak. Tindakan sepihak Amerika Serikat menghancurkan kepercayaan Meksiko terkait komitmen Amerika Serikat untuk menekan aliran senjata. Respons Amerika Serikat dalam implementasi Merida Initiative menunjukkan bahwa penyelundupan senjata bukanlah kepentingan utama bagi Amerika Serikat.

Amerika Serikat mengakui bahwa negaranya menjadi sumber senjata mayoritas yang digunakan oleh DTO Meksiko. Namun regulasi kontrol senjata Amerika Serikat tidak memfasilitasi investigasi atau penuntutan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai terlibat dalam penyelundupan senjata. Hal tersebut

lah yang membuat pemerintah Meksiko mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk membatasi akses kepemilikan senjata tertentu, mengingat bahwa hampir tidak mungkin untuk DTO Meksiko membeli senjata di dalam negeri. Anggapan bahwa regulasi kepemilikan senjata di Amerika Serikat dapat berdampak secara signifikan pada Meksiko mengacu pada Federal Assault Weapon Ban yang pernah diterapkan selama 10 tahun dalam undang-undang federal Amerika Serikat pada tahun 1993-2004 (Mehalko, 2012).

Kadaluarsanya Federal Assault Weapon Ban tahun 2004 memberikan dampak bagi *homicide rate* di Meksiko. Terdapat kenaikan pada *gun-related homicide* setelah tahun 2004 sebanyak 60 persen pada kota di Meksiko yang berbatasan langsung dengan pintu masuk Arizona, New Mexico, dan Texas (Dube; et al, 2013:397).

Meksiko meminta Amerika Serikat untuk meregulasi kembali kepemilikan senjata untuk menekan angka *homicide rate* dan penyelundupan, namun Amerika Serikat menolaknya. Hal tersebut dikarenakan Undang-Undang di Amerika Serikat yang melindungi kepemilikan senjata terhadap penduduk sipil dilindungi dalam *Second Amendment Bill of Rights*. Sikap Amerika Serikat untuk menolak permintaan Meksiko dalam meregulasi senjata dianggap dapat menciderai kedaulatan negaranya. Meskipun terdapat implikasi bagi negara lain, menggabungkan kepentingan nasional dengan kepentingan bersama sulit dilakukan karena negara dituntut untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menjaga hak warga negaranya untuk memiliki senjata yang dilindungi dalam konstitusinya. Sehingga setiap kepentingan yang bertentangan berpotensi menghambat kerja sama internasional. Dalam masalah kepentingan nasional, pertimbangan untuk mendahulukan kewajiban internasional seringkali dihindari oleh Amerika Serikat karena kekhawatiran bahwa pertimbangan tersebut dapat merusak kedaulatannya

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Amerika Serikat tidak cukup berkomitmen dalam menghentikan aliran senjata ke Meksiko. Taktik *walking guns* yang dilakukan dalam operasi Fast Furious menunjukkan kurangnya komitmen Amerika Serikat untuk menghentikan aliran senjata ke Meksiko. Kurangnya komitmen tersebut ditunjukkan dari responsnya dalam menghentikan aliran senjata yang tidak diprioritaskan ketika dihadapkan dengan kepentingannya untuk menangkap bandar narkoba. Alih-alih menghentikan aliran senjata, ATF justru dengan sengaja meloloskan senjata ke tangan DTO dengan harapan dapat menangkap pemimpin dari DTO. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya upaya berkoordinasi dengan pemerintah Meksiko ketika melakukan taktik *walking guns*.

Pada akhirnya, kepentingan nasional negara lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan bersama dalam menanggulangi penyelundupan *Small Arms and Light Weapons*. Tidak adanya mutualitas kepentingan mengakibatkan negara melakukan respons yang berbeda dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari negara lain, bahkan bisa terjadi kecurangan. Tidak adanya mutualitas kepentingan pada akhirnya berdampak pada sulitnya mencapai tujuan dari kerja sama Merida Initiative dalam menanggulangi penyelundupan *Small Arms and Light Weapons*.

## **PENUTUP**

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan adanya kendala dalam kerja sama bilateral Merida Initiative, yaitu tidak terpenuhinya syarat suatu kerja sama dapat berjalan dengan baik. Adanya mutualitas kepentingan dalam suatu kerja sama merupakan suatu syarat kerja sama bilateral dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kendala yang dialami Amerika Serikat dan Meksiko dalam penanggulangan penyelundupan *Small Arms and Light Weapons* periode 2008-2012, yaitu: terdapat kepentingan masing-masing negara yang menyebabkan salah satu negara memprioritaskan kepentingan negaranya sendiri di atas kepentingan bersama sehingga tidak dapat berkomitmen untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tidak adanya mutualitas kepentingan untuk menanggulangi penyelundupan *Small Arms and Light Weapons* menyebabkan adanya peningkatan angka penyelundupan meskipun kedua negara sudah melaksanakan kerja sama Merida Initiative.

Pada analisis penulis, respons masing-masing negara didorong oleh dampak yang dirasakan kedua negara. Perbedaan dampak yang dirasakan karena eksistensi DTO Meksiko, menyebabkan respons yang diberikan berbeda pula. Amerika Serikat yang dampak besarnya terkait narkoba memberikan respons yang besar terkait penanganan narkoba, namun tidak dengan dampak kekerasan bersenjata. Meksiko yang dampaknya meliputi pemakaian narkoba dan yang paling utama adalah masalah kekerasan bersenjata yang tinggi, memiliki kepentingan untuk memberikan respons yang serius terkait penanganan narkoba dan pelucutan senjata.

Dilihat dari dana yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Meksiko dalam kerja sama Merida Initiative, serta pengerahan berbagai institusi dalam negerinya untuk membantu Meksiko, terlihat bahwa Amerika Serikat serius dalam membantu Meksiko menangani permasalahan kejahatan transnasional terorganisir. Namun ketika Amerika Serikat dihadapkan pada preferensi dari kepentingannya, Amerika Serikat lebih memprioritaskan penanganan terkait narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dari skandal operasi Fast and Furious, dimana ATF secara sengaja meloloskan senjata agar dapat menangkap pemimpin narkoba. Dari skandal tersebut terlihat bahwa ketika dihadapkan dengan preferensi dari kepentingannya, Amerika Serikat lebih memprioritaskan kepentingan negaranya untuk menangani permasalahan narkoba dibandingkan menangani penyelundupan senjata.

## **Referensi**

- Axelrod; Robert Keohane. (1985). *Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies and Institutions*. The Johns Hopkins University Press: Vol 38, No.1. Tersedia di <http://www.jstor.org/stable/2010357>
- Camp, Roderic Ai. (2010). *Armed Forces and Drugs: Public Perceptions and Institutional Challenges*. In Eric L. Olson, Donald A. Shirk, and Andrew Selee, editors. *Shared Responsibility: U.S. – Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime*. Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars Mexico Institute.

- Dibble, Sandra; Leslie Berestein. (2009). *Cartels' guns flow from U.S.* [online] The San Diego Union-Tribune. Available at: <http://www.sandiegouniontribune.com/news/2009/mar/25/1n25guns011211-guns-flow-south-border/> [Diakses pada 10 Mar. 2016].
- Dube, Arindrajit; Oeindrila Dube; Omar Garcoa-Ponce. (2013). *Cross-Border Spillover: US Guns Laws and Violence in Mexico*. American Political Science Association: Vol 107. No 3. Available at <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/cross-border-spillover-us-gun-laws-and-violence-in-mexico/438E607A07F32D57AF244B61ED38FB28> [Diakses pada 10 Jan 2017]
- Goodman, Colby. And Michel Marizco. (2010). *US Firearms to Mexico: New Data and Insights Illuminate Key Trends and Challenge*. In Eric L. Olson, David A. Shirk, and Andrew Selee, editors. *Shared Responsibility: U.S. – Mexico Policy Options for Confronting Organized Crime*. (167-203). Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars Mexico Institute.
- Kerlikowske, R.Gil. (2009). *National Southwest Border Counternarcotics Strategy*. DIANE Publishing.
- Mehalko, L. (2012). *This is Gun Country: The International Implications of U.S. Gun Control Policy*. Boston College Law School: Vol 35, Article 7. Tersedia di <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol35/iss1/7>
- Rios, Virdiana; David Shirk. (2011). *Drug Violence in Mexico*. Trans-Border Institute: University of San Diego.
- Small Arms Survey. (2007). *Completing the Count: Civilian Firearms*. Dalam *Small Arms Survey 2007: Guns and the City*. Cambridge University Press.
- Small Arms Survey. (2013). *Captured and Counted: Illicit Weapons in Mexico and The Phillipines*. *Small Arms Survey 2013: Everyday Dangers*. Cambridge University Press
- United States of Government Accountability Office. (2009). *Firearms Trafficking: US Efforts to Combat Arms Trafficking to Mexico Face Planning and Coordination Challenges*. Statement of Jess T.Ford.
- US Department of Justice ([www.justice.gov](http://www.justice.gov))
- US Department of Justice. (2012). *ATF Report: US Firearms and Trace Data*. Tersedia di <https://www.atf.gov/resource-center/data-statistics>
- US Department of Justice. (2012). *A Review of ATF's Operation Fast and Furious and Related Matters*. US Department of Justice Office of the Inspector General. Diakses pada 5 Agustus 2017.
- Weigend, Eugenio; Inigo Guevara. *The Stock of Illegal Firearms in Mexico: An Informed Estimate*.